



“Saya Bikin Salah Apa?”

Kopassus Siksa Orang Papua di Merauke

Copyright © 2009 Human Rights Watch
All rights reserved.
Printed in the United States of America
ISBN: 1-56432-512-1
Cover design by Rafael Jimenez

Human Rights Watch
350 Fifth Avenue, 34th floor
New York, NY 10118-3299 USA
Tel: +1 212 290 4700, Fax: +1 212 736 1300
hrwnyc@hrw.org

Poststraße 4-5
10178 Berlin, Germany
Tel: +49 30 2593 06-10, Fax: +49 30 2593 0629
berlin@hrw.org

Avenue des Gaulois, 7
1040 Brussels, Belgium
Tel: + 32 (2) 732 2009, Fax: + 32 (2) 732 0471
hrwbe@hrw.org

64-66 Rue de Lausanne
1202 Geneva, Switzerland
Tel: +41 22 738 0481, Fax: +41 22 738 1791
hrwgva@hrw.org

2-12 Pentonville Road, 2nd Floor
London N1 9HF, UK
Tel: +44 20 7713 1995, Fax: +44 20 7713 1800
hrwuk@hrw.org

27 Rue de Lisbonne
75008 Paris, France
Tel: +33 (1)43 59 55 35, Fax: +33 (1) 43 59 55 22
paris@hrw.org

1630 Connecticut Avenue, N.W., Suite 500
Washington, DC 20009 USA
Tel: +1 202 612 4321, Fax: +1 202 612 4333
hrwdc@hrw.org

Web Site Address: <http://www.hrw.org>



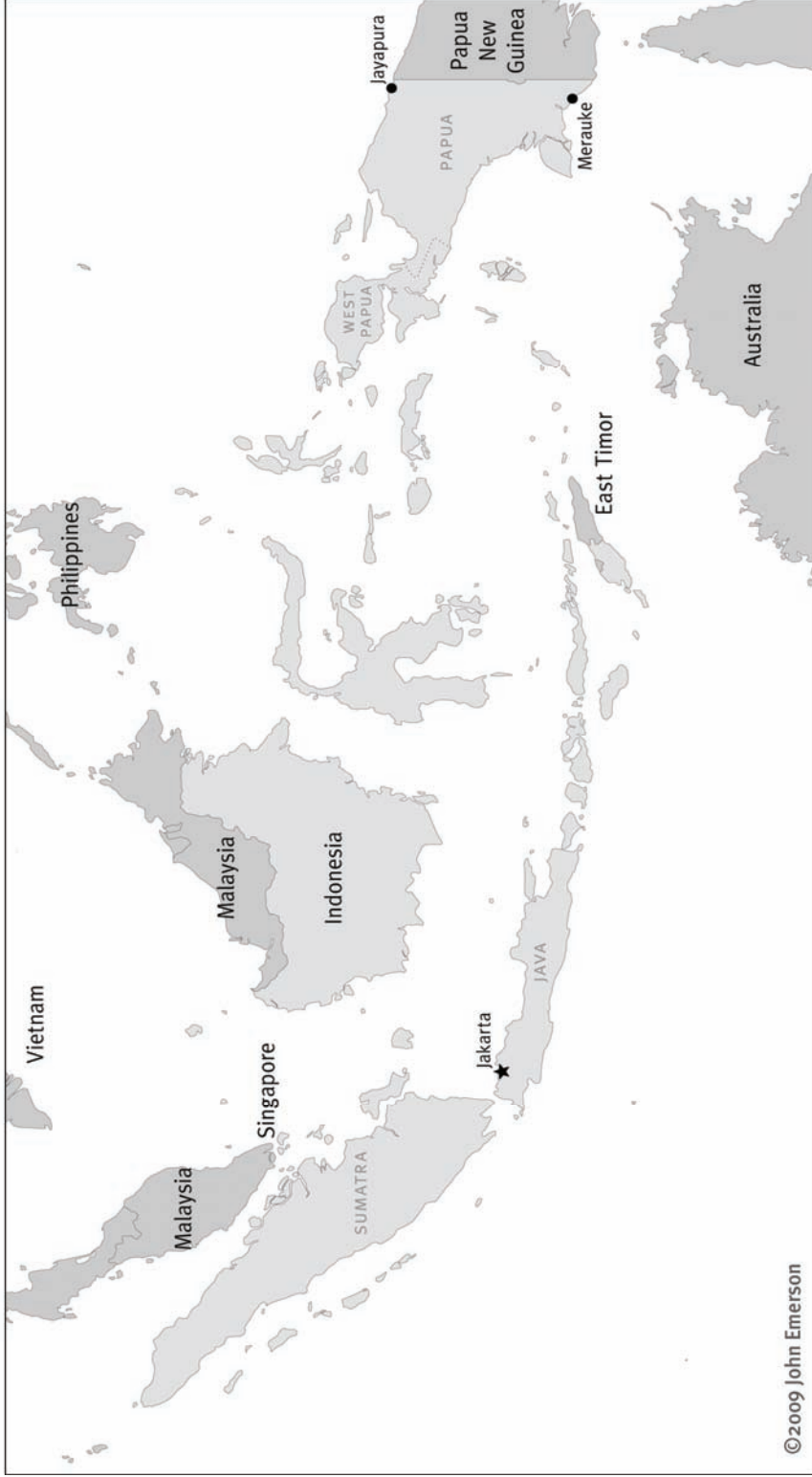
JUNI 2009

1-56432-512-1

“Saya Bikin Salah Apa?” Kopassus Siksa Orang Papua di Merauke

I. Ringkasan	1
II. Kopassus: Sebuah Sejarah Penyiksaan	3
III. Pemukulan dan Penyiksaan oleh Kopassus di Merauke	7
Kasus Satu: Benjamin	8
Kasus Dua: Antonius	8
Kasus Tiga: Nicolaas, Andrew dan Bert	10
Kasus Empat: Yehezkiel.....	11
Kasus Lima: Nathan dan Patrick	12
Kasus Enam: Petrus	12
IV. Rekomendasi	14
Kepada Pemerintah Indonesia.....	14
Kepada Amerika Serikat, Inggris, Australia dan negara terkait lainnya	14
V. Penghargaan.....	16

Map of Indonesia



I. Ringkasan

Beberapa tahun terakhir ini, para sekutu utama militer Indonesia, termasuk Inggris, Australia dan Amerika Serikat, berusaha memperbaiki hubungan mereka dengan Komando Pasukan Khusus —biasa disingkat Kopassus. Dulu Kopassus sering dicerca negara-negara itu karena pelanggaran hak asasi manusia. Sekarang Kopassus dianggap mitra dalam upaya melawan terorisme. Australia telah membuka pintu program pelatihan dengan Kopassus. Inggris juga berencana memulai program training. Para pejabat militer Amerika Serikat, yang dulu dilarang Kongres melibatkan anggota Kopassus dalam program pelatihan mereka, kini meningkatkan hubungan dengan perwira-pewira Kopassus. Salah satu alasan mereka, kerja sama ini akan mendidik perwira-perwira Kopassus menjadi prajurit yang lebih profesional, yang pada gilirannya, dapat mendorong perbaikan catatan hak asasi manusia dari elite militer Indonesia ini. Negara-negara seperti Thailand, Korea Selatan, Singapura, dan Malaysia juga telah menjalin hubungan dengan Kopassus.

Laporan ini mengungkap bukti-bukti baru tentang berbagai kelakuan Kopassus, yang tetap suka melanggar hak-hak dasar warga, seakan-akan mereka kebal hukum. Ketika Human Rights Watch melakukan penelitian di sekitar Merauke, sebuah kota di ujung Papua, sejumlah warga melaporkan beragam penyiksaan oleh Kopassus. Dari Maret hingga Mei 2009, Human Rights Watch mewawancarai lebih dari 20 korban, keluarga korban serta saksi penyiksaan. Hasilnya, sebuah gambar kebrutalan, yang berkali-kali terjadi, terhadap orang Papua kebanyakan.

Penduduk kampung Kelapa Lima di Merauke cerita bagaimana serdadu-serdadu Kopassus, tanpa kewenangan hukum, mengambil orang Papua dari jalan atau dari rumah mereka. Para serdadu ini tak mengenakan pakaian seragam dan tak punya peran resmi dalam upaya menjaga ketertiban umum, namun mereka bertindak seenaknya sendiri atau sebagai reaksi dari keluhan masyarakat. Para korban, yang dibawa ke Mess Kopassus di Kelapa Lima, dipastikan akan diperlakukan dengan buruk, seperti dipukul dengan selang air atau dipaksa mengunyah cabai mentah yang pedas. Banyak orang Papua mengunyah buah pinang, yang sering bikin rongga mulut mereka tergores, hingga bila mengunyah cabai, mulut mereka perih tak tertahankan.

Seorang korban Kopassus mengatakan kepada Human Rights Watch: "Dorang suruh saya buka baju, cuma pakai celana dalam. Dorang langsung pukul, tidak bilang apa-apa. Dorang pakai selang air. Dorang pukul sampai saya berdarah dan luka-luka. Kemudian dorang suruh kitorang pigi ke lapangan tenis. Dorang paksa kitorang lihat langsung matahari dan makan

rica ... Kitorang tak boleh meludah. Rica itu sangat pedas.” Korban lainnya mengatakan, “Dorang tendang dada saya dengan sepatu boot ... Satu Kopassus bentak saya, ‘Kamu orang Papua, satu tentara Kopassus saja bisa bunuh kamu kayak bunuh ayam.’”

Pelanggaran hak asasi manusia dalam laporan ini bukan kekerasan dengan motivasi politik terhadap warga Papua yang diduga terlibat separatisme. Kasus-kasus ini murni hanya masalah hukum dan ketertiban umum sehari-hari, yang bukan kewenangan Kopassus. Warga Merauke mengatakan keluhan mereka mengenai kelakuan Kopassus tidak dipedulikan polisi. Kepolisian Merauke tak punya dasar hukum untuk menangkap anggota Kopassus. Kepolisian Merauke juga tak meneruskan laporan kasus-kasus ini kepada polisi militer, mungkin karena para polisi Merauke takut bila Kopassus membalas. Para pemimpin Kopassus sendiri belum nampak bikin usaha serius guna menegakkan disiplin militer atau menuntut tanggung jawab para anggotanya yang terlibat pelanggaran hak asasi manusia.

Sejarah panjang ketegangan politik dan penyiksaan oleh aparat keamanan Indonesia di Papua telah menciptakan suasana ketakutan di seluruh Papua. Kelakuan Kopassus di Merauke memperdalam ketakutan itu. Seorang tokoh masyarakat Merauke mengatakan kepada Human Rights Watch, “Ini barang sudah sering terjadi, hampir setiap minggu, sampai akhirnya kitorang anggap penganiayaan normal saja. Polisi tidak buat apa-apa. Kopassus bertindak seolah-olah dorang polisi di Merauke.”

Berbagai kasus ini menggambarkan bagaimana kekerasan tumbuh subur ketika budaya kebal-hukum bertahan di jantung Kopassus, yang seharusnya merupakan salah satu unit militer paling terlatih di Indonesia.

Sejumlah rekomendasi, kepada pemerintah Indonesia dan negara-negara sahabatnya, yang terlibat kerja sama dengan Kopassus, terlampir di akhir laporan. Human Rights Watch mendesak pemerintah Indonesia melakukan investigasi secara independen dan imparial terhadap dugaan kejahatan hak asasi manusia oleh Kopassus di Papua, termasuk penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya, serta mendisiplinkan atau menuntut para pelaku dan perwira di atasnya, yang terlibat memberi perintah aksi kekerasan itu, sebagaimana seharusnya.

Human Rights Watch juga meminta Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan negara terkait lainnya untuk menunda pelatihan bagi anggota Kopassus sampai ada usaha serius investigasi dan menuntut tanggung jawab anggota Kopassus, apapun pangkatnya, yang terlibat dalam kejahatan serius hak asasi manusia masa lalu, termasuk beragam kejadian di Merauke yang tersaji dalam laporan ini.

II. Kopassus: Sebuah Sejarah Penyiksaan

Komando Pasukan Khusus, atau Kopassus, dibentuk tahun 1952 untuk mengatasi perlawanan bersenjata Darul Islam di Jawa Barat.¹ Ia lantas terlibat dalam banyak operasi militer, dari "Konfrontasi" dengan Malaysia awal 1960-an sampai pertempuran terbuka dan operasi tertutup di Timor Timur dan Aceh. Anggota Kopassus sekarang sekitar 6.000 prajurit. Mereka terbagi dalam lima grup.

Grup-1 dan Grup-2 adalah pasukan Para Komando, artinya mereka dilatih untuk bekerja dalam kondisi sulit di wilayah musuh. Mereka dilatih terjun payung. Grup-3/Sandi Yudha dilatih dan dikerahkan khusus untuk melakukan operasi intelijen, mengumpulkan informasi dan "mengkondisikan" atau memulai operasi konflik berintensitas rendah.² Jumlah anggota masing-masing grup ini antara 1.200 hingga 1.500 orang, masing-masing terdiri dari tiga batalion. Keempat, Kopassus juga memiliki Pusat Pendidikan Pasukan Khusus di Batujajar, Jawa Barat. Kelima, Satuan-81 Penanggulangan Terror, dengan kekuatan dua batalion, bemarkas di Cijantung, Jakarta.

Kopassus sekarang dipimpin Mayjen Pramono Edhie Wibowo, saudara ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan anak dari almarhum Letjen Sarwo Edhie Wibowo, yang memimpin pasukan baret merah ini pada 1960-an.³ Mayjen Pramono bertanggungjawab kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Agustadi Sasongko.

Kopassus memiliki catatan panjang kejahatan hak asasi manusia dalam operasinya di seluruh Indonesia, termasuk sejak 1970-an di Timor Timur, Aceh, Papua dan Jawa. Pada 1974-75, Kopassus menyusup ke wilayah yang dulu dikenal Timor Portugis (sekarang Timor

¹ Komando Pasukan Khusus ganti nama beberapa kali sejak dibentuk tahun 1952, dari KKAD [Korps Komando Angkatan Darat] menjadi RPKAD [Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat] lantas Kopassadha [Komando Pasukan Sandi Yudha] dan kemudian Kopassus. Untuk memudahkan bacaan, kami pakai istilah Kopassus dalam laporan ini. Ken Conboy, *Kopassus: Inside Indonesia's Special Forces* (Jakarta: Equinox Publishing, 2003). Kopassus, "Sejarah Singkat Kopassus," <http://www.kopassus.mil.id/single/home/21/Sejarah+Kopassus.html> (diakses 5 Juni 2009).

² Dalam bahasa Sansekerta, kata "sandi yudha" artinya "perang rahasia." Pasukan Sandi Yudha, resminya, dibentuk untuk "menciptakan kondisi" atau "mematangkan" suasana perang. Kadang-kadang kata tersebut juga berarti "mempersiapkan" pertempuran. Situs web Kopassus menjelaskan tujuan Grup 3/ Sandi Yudha sebagai "... biasanya digerakkan/ditugaskan jauh sebelum pertempuran dimulai untuk merintis jalan gerakan berikutnya guna menggarap sasaran dalam rangka menciptakan dan memantapkan kondisi yang dikehendaki." Situs Kopassus, "Penjelasan Dhuaja Grup-3 Kopassus." <http://www.kopassus.mil.id/single/home/68/Dhuaja+Grup-3+Kopassus.html> (diakses 1 Juni 2009).

³ Pramono menjadi Komandan Kopassus sejak 30 Oktober 2008. "Brigjen TNI Pramono Edhie Wibowo Danjen Kopassus Baru," situs Kopassus 30 Oktober 2008, <http://www.kopassus.mil.id/dynamic/home/8/Berita/26/Brigjen+TNI+Pramono+Edhie+Wibowo+Danjen+Kopassus+Baru.html> (diakses 19 Juni 2009).

Timur), serta diduga kuat ikut membunuh lima wartawan internasional di kota perbatasan Balibo pada Oktober 1975. Seorang reporter, Roger East, lantas pergi ke Timor Timur untuk menyelidiki pembunuhan kelima wartawan itu dan juga ditembak mati di Dili, diduga atas perintah seorang mantan perwira Kopassus, pada Desember 1975.⁴

Pada 1998, pengadilan militer menghukum 11 anggota Kopassus yang terlibat penculikan dan penyiksaan aktivis mahasiswa di Jawa. Mayor Bambang Kristiono mengaku bahwa ia dan bawahannya menculik para aktivis mahasiswa, namun ia menyangkal telah membunuh mereka (tujuh dari 22 aktivis sampai hari ini masih hilang). Akhirnya, dia dan para atasannya – Kol. Chairawan, Mayjen Muchdi Purwopranjono, dan Letjen Prabowo Subianto – dicopot jabatannya dari Kopassus, tapi mereka tak pernah diadili. Muchdi kemudian menjabat wakil direktur Badan Intelijen Negara. Pada Desember 2008, dalam keputusan yang kontroversial, pengadilan negeri Jakarta Selatan membebaskan Muchdi dari tuntutan pembunuhan Munir Thalib, aktivis hak asasi manusia, yang diracun pada 2004. Prabowo sekarang calon wakil presiden Indonesia.

Kopassus memiliki sejarah di Papua, berawal sejak Papua masih di bawah administrasi Kerajaan Belanda.⁵ Pada 1962, Kopassus terlibat dalam sebuah operasi tertutup, menyusup ke Merauke. Kapten Benny Moerdani memimpin satu pasukan, melakukan terjun payung ke daerah rawa-rawa dekat Merauke untuk menyerang militer Belanda.⁶

Setelah Belanda menarik diri dari Papua pada tahun yang sama, Kopassus terus terlibat dalam operasi, yang seringkali berdarah, dengan melakukan intimidasi, dan akhirnya berujung pada Penentuan Pendapat Rakyat pada Juli-Agustus 1969, dimana 1,054 wakil warga Papua, yang semuanya ditentukan Jakarta, bulat-bulat memilih integrasi dengan Indonesia – peristiwa ini, menurut pandangan banyak warga Papua, adalah manipulasi, alasan palsu yang dipakai pemerintah Indonesia guna menguasai wilayah tersebut.

⁴ Jill Jolliffe, *Cover-up: the Inside Story of the Balibo Five* (Melbourne: Scribe Publications, 2001); Tony Maniaty, *Shooting Balibo: Blood and Memory in East Timor* (Sydney: Penguin, 2009).

⁵ Wilayah Papua sisi Indonesia menempati setengah bagian barat dari Pulau New Guinea. Awalnya, Indonesia mengaturnya sebagai satu provinsi tapi, pada 2003, lewat keputusan Presiden Megawati Soekarnoputri, ia dibagi dua. Provinsi baru Papua Barat kini mencakup bagian barat wilayah tersebut dengan ibukota Manokwari. Provinsi baru di bagian timur masih disebut Papua, dengan Jayapura sebagai ibukota.

⁶ Benny Moerdani kelak menjabat kepala Angkatan Bersenjata Indonesia pada 1983-1988. Julius Pour, *Benny Moerdani: Profil Prajurit Negarawan* (Jakarta: Yayasan Keuangan Panglima Besar Sudirman, 1993), hal. 161-191. Menurut Benny Moerdani, ia mengusulkan ide menyusup ke Merauke karena slogan, “Dari Sabang sampai Merauke”. Sabang adalah kota di ujung paling barat di Aceh, Sumatera, sementara Merauke, dianggap kota di ujung paling timur kepulauan Indonesia. Slogan tersebut juga judul sebuah lagu, “Dari Sabang Sampai Merauke”, yang terkenal di Indonesia. Slogan itu dipakai untuk menyatukan kepulauan sepanjang enam ribu kilometer ini. Moerdani berpendapat, penguasaan Merauke akan memberikan pengaruh psikologis bagi kampanye Presiden Soekarno untuk mengambil-alih Papua dari Belanda. Soekarno memakai frase tersebut ketika memerintahkan invasi militer di Papua.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui hasil Pepera dan mengesahkan kepemilikan Indonesia terhadap Papua. Sulit untuk menentukan berapa orang Papua yang tewas selama periode persiapan Pepera karena para diplomat PBB menghadapi pembatasan untuk bergerak bebas selama berada di Papua. Panglima militer Indonesia saat itu adalah Mayjen Sarwo Edhie Wibowo.⁷

Kebal hukum identik dengan keberadaan militer Indonesia. Kopassus bukan saja beroperasi di tempat-tempat terpencil Papua juga melakukan operasi di daerah perkotaan. Salah satu kasus paling terkenal, yang masih diingat banyak warga Papua, adalah penahanan dan penyiksaan terhadap antropolog-cum-musikus Arnold Ap dari Universitas Cenderawasih di Jayapura, pada November 1983.⁸ Pada 25 April 1984, setelah meloloskan diri dari kantor polisi Jayapura, Arnold Ap mati ditembak di perutnya.

Pada November 2001, Kopassus menculik dan membunuh tokoh masyarakat Papua Theys Eluay di Jayapura. Malam itu, Theys ikut perayaan Hari Pahlawan yang diadakan Kopassus di daerah Hamadi, dimana markas Kopassus berada. Awalnya, Kopassus menyangkal terlibat pembunuhan itu. Namun tekanan dunia internasional memaksa kepolisian Indonesia melakukan penyelidikan. Pada 2003, pengadilan di Surabaya menghukum tujuh prajurit Kopassus, termasuk Letnan Kolonel Hartomo, melakukan penganiayaan, yang berakibat kematian Eluay. Namun mereka tak terbukti melakukan pembunuhan. Hukuman penjara ke tujuh prajurit itu antara dua hingga 3,5 tahun penjara. Kasus ini membuat Presiden Megawati Soekarnoputri memerintahkan Kopassus untuk meninggalkan Papua. Namun Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu justru memuji para terhukum sebagai "pahlawan Indonesia" karena berhasil membunuh "pemberontak". Tak ada investigasi lebih lanjut untuk mengetahui siapa yang memerintahkan pembunuhan itu dan tak ada pejabat senior yang dituntut tanggungjawabnya.

Pada 17 Oktober 2007, seorang tentara Kopassus, yang sedang menyamar sebagai sopir untuk seorang pejabat pemerintah daerah, memukul Charles Tafor, kepala Distrik Arso 1, Kabupaten Keerom, hanya karena sebuah kecelakaan lalu-lintas.⁹ Pemukulan ini bikin warga Arso menuntut penarikan Kopassus dari Keerom. Letkol Isak Pangemanan, komandan

⁷ John Saltford, *The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1969* (London: Routledge Curzon, 2003).

⁸ Robin Osborne, *Indonesia's Secret War: The Guerilla Struggle in Irian Jaya* (Sydney: Allen & Unwin, 1986) hal. 149-154. Anne Marie Feith, *We don't want bullets.... We can do this through talk: A Human Rights Response to Indonesian Rule in West* (Melbourne: RMIT University, School of Social Science & Planning, Juni 2005). Diana Glazebrook, "Teaching Performance Art is Like Sharpening the Blade of a Knife," *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, Vol. 5, No. 1, April 2004, hal. 1-14.

⁹ "TNI di Perbatasan Papua Jangan Teror Warga," *Voice of Human Rights, Media VHR*, 24 Oktober 2007, <http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita,TNI-di-Perbatasan-Papua-Jangan-Teror-Warga-903.html> (diakses 19 Juni 2009).

Kopassus di Jayapura, secara terbuka minta maaf. Namun tak ada pengumuman terbuka tentang hukuman untuk prajurit Kopassus yang melakukan pemukulan.

III. Pemukiman dan Penyiksaan oleh Kopassus di Merauke

Kota Merauke terletak di pantai selatan Papua, dekat perbatasan dengan Papua New Guinea. Banyak transmigran dari Pulau Jawa bermukim di Merauke. Kampung Kelapa Lima di Merauke adalah daerah kelas menengah, tenang dan hijau dalam kota Merauke. Kopassus mulai muncul di Kelapa Lima sejak 2006. Warga Kelapa Lima mengetahui kehadiran Kopassus dari sebuah tanda di dinding sebuah rumah sewa di Jalan Doom bertuliskan "Mess Kopassus". Perlahan-lahan, jumlah prajurit Kopassus di mess itu terus meningkat. Pada 2006, Kopassus menyewa sebuah rumah kost, saat ini mereka sudah memakai enam petak rumah dalam satu halaman.

Pada 17 April 2009, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa hanya ada sekitar 50 prajurit Kopassus di seluruh Papua dan Papua Barat. Mereka diatur dalam satu kelompok, terdiri 10 hingga 20 prajurit. Namun, warga Kelapa Lima memperkirakan ada 30 prajurit Kopassus, yang keluar masuk di Mess Kopassus. Padahal Kopassus juga ditempatkan di Jayapura, Wamena, Asikie, Timika, Kerom, Manokwari, Nabire, Puncak Jaya dan Sorong—tentu ini menandakan jumlah pasukan yang lebih banyak.

Resminya, Kopassus beroperasi di Papua untuk memantau dan menekan gerakan Organisasi Papua Merdeka, yang melakukan perlawanan bersenjata terhadap Indonesia sejak 1960-an.¹⁰ Seorang wartawan Timika mengatakan kepada Human Rights Watch, "Jumlahnya masih simpang siur ... antara 300-500an. Mobilitas sangat tinggi. Artinya, dalam sekejap mereka bisa pindah dari satu kabupaten ke kabupaten lain, atau satu distrik ke distrik lain. Mereka biasanya ngontrak rumah penduduk. Atau makai beberapa kantor dinas untuk kamuflase."¹¹

¹⁰ Sayap bersenjata gerakan perlawanan di Papua disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM). Perlawanan separatis di daerah ini mengakibatkan kehadiran tentara Indonesia dalam jumlah sangat besar dan menciptakan suasana saling curiga serta ketakutan. Gerilyawan Papua sering terlibat kontak senjata dalam skala kecil dengan tentara Indonesia. Militer Indonesia, yang takut dengan keberhasilan gerakan kemerdekaan seperti terjadi di Timor Timur, melakukan operasi penyisiran secara rutin untuk mencari gerilyawan OPM atau pendukungnya. Sudah terlalu sering ada orang Papua yang tidak terlibat dalam pemberontakan bersenjata juga ditangkap pada saat sweeping atau ditangkap sebagai pembuat onar karena menyatakan pendapat politik mereka secara damai, yang notabene dijamin dan dilindungi secara internasional, sebagai kebebasan menyatakan pendapat. Lihat juga Human Rights Watch, *Indonesia - Out of Sight: Endemic Abuse and Impunity in Papua's Central Highlands*, July 4, 2007, <http://www.hrw.org/en/reports/2007/07/04/out-sight-o>. Human Rights Watch, *Indonesia - Protest and Punishment: Political Prisoners in Papua*, February 20, 2007, <http://www.hrw.org/en/reports/2007/02/20/protest-and-punishment>, (diakses 19 Juni 2009)

¹¹ Wawancara *Human Rights Watch* (nama dirahasiakan), Timika, April 2009.

Enam kasus berikut terjadi antara Agustus 2007 dan Mei 2009 di Merauke. Nama-nama korban, yang ditangkap dan disiksa, serta nara sumber lain, disamarkan untuk menjaga keamanan mereka, yang bicara dengan Human Rights Watch.

Kasus Satu: Benjamin¹²

Pada Jumat malam Mei 2009, Benjamin, 23 tahun, sedang minum *sopi*, sebuah minuman alkohol dari irisan nira kelapa, dengan tiga orang teman dalam rumahnya di Kelapa Lima. Tiba-tiba terdengar seorang perempuan teriak, “Adoh, tolong saya dulu.” Mengira sedang terjadi percobaan perkosaan, ia dan temannya, Abner, pergi cari sumber teriakan itu.

Di sebuah persimpangan jalan, mereka berjumpa dengan lima prajurit Kopassus, memegang senter, dan seorang lelaki Papua, yang juga sedang berusaha mencari tahu siapa berteriak. Benjamin kenal lelaki Papua itu. Mereka bicara sebentar sebelum para prajurit pergi dengan dua sepeda motor. Sekitar 15 menit, kelima prajurit itu kembali dan langsung memegang Benjamin dan Abner.

Benjamin mengatakan para tentara itu minta Benjamin dan Abner pergi bersama ke pos Kopassus. Benjamin tanya, “Saya bikin salah apa?” Satu tentara Kopassus marah, sebuah pukulan melayang ke belakang kepala Benjamin. “Sudah, ikut dulu ke pos,” tiru Benjamin terhadap Kopassus. Sepanjang jalan, dia ditempeleng lima kali. Mereka tanya tentang teman-temannya dan perempuan yang berteriak. Benjamin menjawab dia tidak tahu apa-apa. Bukan dia yang bikin ribut. Abner berhasil memisahkan diri dari mereka dan melarikan diri. Para tentara itu tak berusaha mengejar Abner.

Kelima tentara itu membawa Benjamin ke ruang belakang, dekat sisi rumah, mess Kopassus, tempat mereka menampar, memukul kepala dan dada, serta menendang perutnya. Benjamin mengatakan pemukulan itu berlangsung sekitar satu jam sampai pukul 11 malam. Ketika sebuah mobil polisi Merauke datang, para prajurit Kopassus itu menyerahkan Benjamin kepada polisi.¹³

Kasus Dua: Antonius

Sekitar pukul 9 malam, September 2008, Antonius, 21 tahun, ikut sebuah pesta jalanan di Kelapa Lima, dekat Mess Kopassus, tempat ia minum dan joget. Tiba-tiba, sebuah mobil van

¹² Wawancara terpisah *Human Rights Watch* dengan “Benjamin” dan saudara Benjamin (nama dirahasiakan), Merauke, Juni 2009.

¹³ Polisi tidak dapat menemukan perempuan yang berteriak, Benjamin dibebaskan keesokan harinya.

berhenti dan keluarlah enam pria, membawa senjata, pakai jaket hitam dan tutup muka. Tanpa bertanya apa pun, mereka memukul anak-anak muda di sana. Banyak yang lari. Antonius mengatakan kepada Human Rights Watch:

Saya lari sampai di satu simpang jalan, ada got air. Saya jatuh. Dorang datang tangkap saya. Dorang tarik masuk saya lewat pintu dorong mobil. Dorang bawa ke mess (Kopassus) dan pukul saya. Dorang bawa masuk satu kamar, borgol tangan saya di belakang. Dorang suruh saya berlutut. Lantas dorang pukul, pukul saya punya wajah. Saya jatuh. Saya tak bisa lindungi kepala, sehingga kepala saya hantam itu lantai.¹⁴

Para tentara itu menjotos wajah Antonius berulang kali, dan memukuli dengan menggunakan selang air, ketika ia terjerebab di lantai. Kemudian mereka menyuruh duduk di kursi. Setiap tentara Kopassus, yang masuk dalam ruang itu—jumlah 12 orang—memukulnya. Antonius mengatakan para tentara itu menendang, dari malam sampai pagi. Dia mengatakan kepada Human Rights Watch:

Dorang pukul saya di bagian muka berulang-kali. Muka saya berdarah. Mata bengkok. Ada satu Kopassus pegang kerah baju saya dan yang lain tendang perut saya. Saya tanya, "Saya bikin salah apa?" Dorang tak peduli dan jawab, "Ah kamu!"¹⁵

Beberapa tentara menarik Antonius ke pojok ruang dan menendangi dengan sepatu boot sampai dia muntah darah. Pagi hari, para tentara memaksa Antonius mengunyah sekitar 10 buah rica (cabai). Kemudian mereka membawa Antonius ke halaman mess dan melemparnya ke kolam air. Mereka lantas suruh Antonius membersihkan taman. Dia berkata:

Saya tak bisa makan sehari-hari karena itu rica. Dorang pukul di sini ... di rahang dan bagian dalam mulut saya berdarah. Satu minggu saya hanya makan Indomie. Saya bilang sama saya punya orangtua, tapi orangtua tak dapat buat apa. "Apa yang bisa kitorang bikin? Mau marah juga tak bisa. Dorang itu Kopassus!"

¹⁴ Wawancara *Human Rights Watch* dengan "Antonius", Merauke, Maret 2009.

¹⁵ Ibid.

Saya bilang itu kejadian adalah kejam sekali, dorang bikin sakit saya, tetapi kitorang sangat takut dengan Kopassus. Saya tak pigi ke dokter tapi diobati saja dengan antibiotik. Saya tak lapor polisi atau orang lain. Saya hanya bilang pada teman-teman, "Kalau kau mabuk jangan jalan dekat mess Kopassus."¹⁶

Kasus Tiga: Nicolaas, Andrew dan Bert¹⁷

Sekitar pukul 8, suatu pagi April 2008, lima tentara Kopassus mengepung rumah Nicolaas, 27 tahun. Semalaman dia bikin acara minum-minum dengan teman-temannya. Para tentara itu minta Nicolaas dan dua temannya, Andrew, 25 tahun, dan Bert, 26 tahun, keluar untuk dibawa ke mess Kopassus. Orangtua Nicolaas lihat anaknya ditangkap, tapi terlalu takut untuk mencegah. Nicolaas menggambarkan kepada Human Rights Watch tentang apa yang terjadi dalam mess Kopassus:

Dorang suruh kitorang buka baju, sampai cuma pakai celana dalam. Dorang langsung main pukul, zonder bilang apa-apa. Dorang pakai selang air. Pukul di punggung, pukul di muka. Dorang pukul sampai saya dan teman-teman ada darah. Luka-luka semua. Lantas dorang suruh saya ke lapangan tenis. Dorang paksa kitorang lihat matahari dan makan rica ... Kitorang tak boleh buang ludah. Rica pedas sekali. Setelah makan rica, tahu kalau banyak orang sini agama Katholik, dorang suruh saya berdoa "Bapa Kami" dan "Salam Maria." Saya tolak, saya bilang, "Ini bukan tempat suci, ini bukan tempat berdoa." Kopassus itu lantas tendang saya. Dua orang teman saya takut dan berdoa. Dorang juga bikin Andrew telanjang total. Satu Kopassus ambil foto dengan dorang punya hape. Beberapa tetangga lewat bisa lihat kitorang disiksa di halaman mess Kopassus. Satu mama menangis lihat kitorang tidak berdaya, disiksa Kopassus.¹⁸

Nicolaas mengatakan penyiksaan itu berlangsung sekitar dua jam. Dari lapangan tenis, tentara-tentara itu membawa kembali ketiga pemuda itu ke dalam ruang mess. Para tentara itu menyuruh mereka mandi dan menawarkan minyak tawon untuk obati luka-luka. Ketiga pemuda ini menolak. Mereka kemudian disuruh pergi. Nicolaas berkata:

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Wawancara *Human Rights Watch* dengan "Nicolaas" dan "Andrew", Merauke, Maret 2009.

¹⁸ Ibid.

Sekarang anak-anak Papua tak mau dekat-dekat mess Kopassus. Tentara-tentara itu suka cari anak-anak yang mabuk; mereka masuk ke rumah-rumah. Sebelum Kopassus datang, Kelapa Lima kampung aman. Sekarang kitorang tak berasa aman lagi.¹⁹

Kasus Empat: Yehezkiel

Di suatu sore Maret 2008, Yehezkiel, 19 tahun, jalan kaki melintasi mess Kopassus, sesudah minum. Satu Kopassus, berpakaian biasa, yang hanya dikenal dengan nama "Acong" orang Batak, menariknya masuk dalam mess. Dia menanyakan seorang teman Yehezkiel.

Menurut Yehezkiel, dia jawab bahwa dia tidak tahu di mana temannya itu berada. Acong marah dan langsung memukulnya. Ini dilakukan di muka, kepala, dada, punggung sampai Yehezkiel jatuh pingsan di lantai. Acong menyiram air agar cepat sadar. Yehezkiel memperkirakan peristiwa pemukulan itu berlangsung lebih dari satu jam .

Beberapa anak kecil, yang juga lewat jalan depan mess, dengar rintihan Yehezkiel. Mereka lari dan lapor kepada keluarga Yehezkiel. Anak-anak bilang kalau Yehezkiel dipukul di mess Kopassus. Salah satu anggota keluarga mendatangi mess Kopassus. Yehezkiel bilang dia merintih dan minta tolong saudara, "Kaka tolong saya, dorang mau bunuh saya."²⁰ Saudara itu mengajak Acong bicara dan bilang dia ingin membawa Yehezkiel pulang.

Seorang kerabat Yehezkiel mengatakan kepada Human Rights Watch:

Yehezkiel cerita dorang dipukul habis-habisan, bagian perut dengan menggunakan selang air sebesar ini [diameter sekitar 7 sentimeter]. Tidak keluar darah, dan saya tak lihat ada memar, tapi itu sangat sulit dilihat karena dorang punya kulit hitam sekali. Dorang tak mau pigi ke rumah sakit. Dorang tolak. Kitorang khawatir sekali, khawatir dorang mengalami pendarahan di dalam. Tapi satu sepupu, seorang dokter, merawat Yehezkiel di rumah sampai sembuh.²¹

¹⁹ Ibid.

²⁰ Wawancara *Human Rights Watch* dengan "Yehezkiel", Merauke, Maret 2009.

²¹ Wawancara Human Rights Watch dengan saudara "Yehezkiel" (nama dirahasiakan), Merauke, Maret 2009. Human Rights Watch juga meverifikasi pernyataan Yehezkiel dengan dua orang tetangganya.

Kasus Lima: Nathan dan Patrick

Suatu pagi Januari 2008, Nathan, 22 tahun, sedang jalan dengan kakaknya, Patrick, 24 tahun, dan seorang teman mereka, ketika seorang tentara, naik sepeda motor melewati mereka. Teman Nathan menghentikan tentara itu dan minta rokok. Kedua bersaudara itu terus berjalan. Beberapa saat kemudian temannya itu menyusul mereka, setelah dapat rokok. Tiba-tiba, muncul dua Kopassus, kejar mereka, berteriak dan mengeluarkan tembakan peringatan ke udara. Mereka pun lari. Tapi dua Kopassus itu terus mengejar. Minta mereka berhenti.

Nathan dan Patrick sembunyi di sebuah rumah, tapi Kopassus menemukan mereka. Menurut Nathan, sepanjang jalan dipukuli sampai berdarah. Mereka dibawa ke mess Kopassus. Disana Kopassus merantai tangan Patrick dengan rantai anjing. Nathan bercerita kepada Human Rights Watch:

Kitorang disuruh taruh tangan di belakang dan berlutut. Dorang pukul kitorang. Dorang terus pukul saya punya wajah, darah di mana-mana. Saya tak tahu alasannya apa. Saya kira dorang tak suka ada teman minta rokok pada tentara.²²

Menurut Nathan, ada enam Kopassus memukul dua bersaudara itu, dari pukul 8 sampai 9 pagi. Para tentara menyuruh seorang tukang kayu, yang sedang bekerja dekat mess, untuk ikut memukul Nathan dan Patrick. Kemudian tentara-tentara itu memaksa kakak-adik itu makan cabai mentah sambil terus memukul mereka. Nathan mengatakan banyak tetangga, yang menyaksikan pemukulan itu, karena mereka dapat melihat halaman mess melalui pagar terbuka dari jalan di depannya. Namun para tetangga diam saja.

Kopassus lantas menelepon polisi Merauke untuk jemput dua bersaudara itu. Polisi datang membawa mereka ke kantor polisi Merauke. Polisi kemudian membebaskan mereka tanpa tuntutan apapun.

Kasus Enam: Petrus

Suatu sore, sekitar pukul 4, Agustus 2007, terjadi perkelahian antar pemuda, yang sedang pesta dan minum-minum, di sebuah rumah di Kelapa Lima. Petrus, 41 tahun, yang juga habis minum dekat situ, ingin melihat apa yang terjadi. Lima tentara Kopassus, berpakaian biasa, tiba di rumah itu dengan sepeda motor. Para pemuda pun berlarian. Menurut Petrus,

²² Wawancara Human Rights Watch dengan "Nathan", Merauke, Maret 2009.

yang sedang berdiri di seberang jalan, para tentara datang menghampirinya. Dia mengatakan tidak terlibat perkelahian itu, tapi mereka tetap memborgol tangan dan membawa pergi, naik sepeda motor, menuju mess Kopassus.

Dalam mess, para tentara Kopassus menyuruh Petrus berjongkok di lantai, memukuli berulang kali dengan selang air. Mereka menendang dada dengan sepatu boot. Petrus mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa dia kenal salah satu dari mereka, yang menendangi, sebagai komandan Kopassus. Seorang Kopassus lain teriak: "Kamu orang Papua, satu tentara Kopassus saja bisa bunuh kamu kayak bunuh ayam!"²³ Kata Petrus kepada Human Rights Watch:

Saya tunduk kepala. Saya lindungi kepala dan tak bisa lihat dorang satu-satu, tapi saya kira ada sekitar 10 Kopassus siksa saya. Pukulan dan tendangan dorang bikin memar, warna biru di dada saya —sakit sekali. Sampai sekarang [18 bulan kemudian] saya masih rasa sakit. Sangat susah bagi saya untuk angkat beban lagi. Dulu ada luka dalam di punggung saya—panjang warna hitam dan belakangan kulit saya mengelupas.²⁴

Petrus mengatakan pemukulan itu terjadi selama 15 hingga 30 menit, sampai seorang saudaranya datang. Saudaranya mengatakan status sosial Petrus. Maka para tentara Kopassus berhenti memukul dan memanggil polisi. Polisi membawa Petrus pergi dari mess Kopassus, menahan semalam di tahanan Polres Merauke, dan membebaskan esok hari tanpa tuntutan apapun.

Petrus berusaha melaporkan penahanan dan pemukulan itu kepada polisi, tapi polisi menjawab bahwa Kopassus terlalu berbahaya bagi mereka. Pasukan Kopassus juga tidak berada dalam yurisdiksi polisi. Petrus menanyakan apakah ia dapat melaporkan kasusnya kepada polisi militer? Namun polisi justru melarang Petrus lapor ke polisi militer. Polisi mengatakan bahwa polisi militer pun takut terhadap Kopassus.

²³ Wawancara Human Rights Watch dengan "Petrus", Merauke, Maret 2009.

²⁴ Ibid.

IV. Rekomendasi

Kasus-kasus dalam laporan ini mengungkapkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia oleh Kopassus terjadi tak hanya terhadap orang Papua, yang dicap “pemberontak” atau “separatis,” tapi juga terhadap warga biasa. Sepengetahuan kami, tak ada satu pun prajurit Kopassus di Merauke, yang diselidiki atau dihukum, sehubungan dengan semua pemukulan yang telah disebutkan di atas.

Kepada Pemerintah Indonesia

- Lakukan investigasi yang independen dan imparial atas pelanggaran hak asasi manusia oleh Kopassus di Papua, termasuk perlakuan kejam, penyiksaan dan penangkapan serta penahanan yang sewenang-wenang.
- Lakukan upaya menegakan disiplin atau menghukum pelaku penyiksaan itu. Lakukan pula investigasi dan menuntut tanggung jawab komandan yang berwenang jika mereka mengetahui atau seharusnya mengetahui penyiksaan itu namun gagal mencegah atau mengambil tindakan terhadap mereka yang seharusnya bertanggungjawab.
- Ambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi korban dan saksi dari kemungkinan tindakan balas-dendam oleh anggota Kopassus atau pihak lainnya.
- Pastikan bahwa anggota Kopassus tidak terlibat dalam upaya penegakan ketertiban masyarakat, yang semata-mata menjadi tanggung jawab polisi. Sampaikan secara terbuka daftar tugas Kopassus di Papua.
- Umumkan secara transparan jumlah tentara Kopassus yang ditugaskan di Papua, lokasi penugasan serta tanggung jawab mereka.
- Akhiri pembatasan bagi para pengamat independen, termasuk diplomat, wartawan asing, dan berbagai organisasi hak asasi manusia, untuk masuk ke Papua, hingga mereka dapat mengunjungi Papua tanpa membutuhkan izin atau persetujuan khusus.

Kepada Amerika Serikat, Inggris, Australia dan negara terkait lainnya

- Tunda program training dengan semua perwira Kopassus hingga terlihat upaya serius untuk investigasi dan menuntut tanggung jawab anggota Kopassus, apapun pangkatnya, yang melakukan berbagai kejahatan hak asasi manusia masa lalu, termasuk beragam kejadian di Merauke seperti dijelaskan dalam laporan ini. Indonesia sangat memerlukan hubungan antar institusi militer, terutama training

bagi para prajurit dan perwira, dan sanksi semacam ini kepada militer Indonesia dapat menjadi tekanan penting untuk mengakhiri situasi kebal-hukum yang telah sekian lama dinikmati tentara-tentara Indonesia.

- Desak pemerintah Indonesia menyelidiki dugaan-dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan anggota Kopassus di Papua dan hukum mereka, apapun pangkat dan jabatannya.
- Berikan dukungan lebih besar kepada lembaga swadaya masyarakat di Papua, dan Indonesia pada umumnya, untuk memantau kejahatan hak-hak asasi manusia, selenggarakan pendidikan hak asasi manusia bagi wakil pemerintah dan warga masyarakat biasa, serta berikan bantuan kepada korban penyiksaan berupa layanan hukum dan medis.
- Dukung pelatihan secara menyeluruh bagi polisi di Papua untuk meningkatkan keahlian polisi dalam menanggapi secara efektif beragam pengaduan kejahatan sambil tetap menghargai hak asasi manusia.
- Secara terbuka menekan pemerintah Indonesia mengakhiri pembatasan akses ke Papua bagi pengamat independen, termasuk diplomat, wartawan luar negeri dan berbagai organisasi hak asasi manusia.

V. Penghargaan

Laporan ini ditulis dan diedit oleh Divisi Asia berdasarkan penelitian beberapa periset, sejak Maret hingga Mei 2009.

James Ross, direktur hukum dan kebijakan Human Rights Watch, memberikan tinjauan hukum. Joseph Saunders, wakil direktur program Human Rights Watch, melakukan kajian program. Dukungan administratif dan teknis diberikan Pema Abrahams dan Andrea Cottom, rekanan Divisi Asia. Fitzroy Hepkins dan Grace Choi mendukung produksi laporan ini.